

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta:Prisma Media, 2004
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta:ICCE Jakarta, 2000
- Dahlan Thalib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta:Raja grafindo persada, 2001
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), *Mahkamah Konstitusi:Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta:P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003
- Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum & Negara*, Bandung:Nusa Media, 2011
- Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia press, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- M.Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: badan hukum pembinaan hukum nasional, 2011
- M.Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogya:Tiara Wacana, 1991
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Press, 2006
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000
- Mohammad Najib, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005

- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung:Refika Aditama, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sartono Sarlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negara Barbar*, Yogyakarta:Thafa Media, 2012
- Soehino, S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2011
- Wendi Melfa, *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*, Bandar Lampung:BE Press, 2013

#### **JURNAL:**

- AD. Basniwati, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal IUS* vol 11, no 5, 2014
- Didik Sukriono, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* vol. II, 2009
- Galuh Kartiko, Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* vol. II, 2009
- Jailani, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, *Jurnal inovatif* vol VIII, Jakarta, 2015
- Leli Salman, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung "Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis", *Jurnal Aspirasi* vol.1 No.2, 2011
- Mardian wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam pengujian Undang-Undang, *Jurnal konstitusi* vol 12 nomor 2, Jakarta, 2015
- Nanang Sri Darmadi, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Semarang, 2011
- Rusli, Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada, *Jurnal Katalogis*, Vol 3 Nomor 12, 2015

Slamet Suhartono, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi* Vol.12, 2015

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya, *Jurnal Konstitusi* Vol II nomor 2, 2010

#### **INTERNET:**

Anonim, Pelaksanaan Pemilihan Umum dan demokrasi di Indonesia, [https://www.academia.edu/6790020/pemilihan\\_umum\\_dan\\_demokrasi](https://www.academia.edu/6790020/pemilihan_umum_dan_demokrasi), diunduh, 29 Maret 2018, Pukul 12.00 WIB

Mahkamah Konstitusi, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diunduh pada 13 Mei 2018 pukul 14.50 WIB

Anonim, dalam pengertian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia), diunduh pada 13 Mei 2018 pukul 14.46 WIB

Zulkarnain Hamson, <http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-di-indonesia-bagian-1/>, diunduh pada 18 Juni 2018 pukul 08.45 WIB

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**LAIN-LAIN:**

Nasrullah dan Tanto Lailam, Laporan penelitian dengan judul *Desain Badan Peadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, pada tahun 2017